

Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menurunkan Angka Putus Sekolah Di Salu Kelurahan Nalu Kabupaten Tolitoli

Moh Fadel^{1*}, Abd Kahar², Andi Nur'Aini³

¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Madako Tolitoli

³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Madako Tolitoli

*email; fadelamirullah2512@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menurunkan angka putus sekolah di Salu Kelurahan Nalu RW 12 Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dengan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori peran dengan 3 indikator yaitu peraturan, pelaksanaan dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator peraturan belum terpenuhi secara optimal. Hambatan utamanya meliputi distribusi bantuan pendidikan yang belum merata, sosialisasi program wajib belajar 12 tahun yang terbatas, serta rendahnya akses informasi bantuan atau beasiswa seperti BOS dan PIP sehingga masih banyak anak putus sekolah di Salu khususnya dari keluarga kurang mampu. Indikator pelaksanaan juga belum optimal, sosialisasi akan pentingnya pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, sehingga masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk menekan angka putus sekolah. Indikator perilaku juga belum terpenuhi secara maksimal. Responsivitas, akuntabilitas dan efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan, koordinasi dan evaluasi yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci : Peran Dinas Pendidikan; Angka Putus Sekolah

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses pembentukan pengalaman yang terus-menerus dan bersifat interaktif antara individu dan lingkungannya, yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia agar dapat hidup dengan baik di tengah masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Pasal 1 Ayat berbunyi “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.” Dan pada Pasal 9 menegaskan “Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua /walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan /atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.” Dari penjelasan tersebut bisa kita pahami bahwa warga negara Indonesia yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai dalam proses berpendidikan pemerintah daerah harus dan wajib memberikan bantuan.

Upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat kita lihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dikeluarkannya sebuah program wajib belajar 12 tahun (Iis Margiyanti, 2023). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 pendidikan menengah universal disusun sebagai landasan yang menekankan kewajiban pemerintah dalam mengupayakan penyelenggaraan pendidikan. Aturan ini sekaligus mengarahkan agar program wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana dengan baik.

Putus sekolah pada jenjang pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah menetapkan program wajib belajar sembilan tahun, data menunjukkan bahwa ribuan anak masih tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Faktor penyebabnya beragam, meliputi kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, faktor budaya, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar (Ananda, 2025). Masalah anak putus sekolah ini adalah masalah yang sangat rumit dan masih sulit untuk diselesaikan hingga saat ini. Keluarga, lokasi geografis, sosial, ekonomi dan lingkungan adalah beberapa penyebab anak putus sekolah (Fauziah, 2024).

Kelurahan Nalu yang strategis bagi masyarakat karena berada dekat dengan pusat kota menjadikan Kelurahan Nalu sebagai salah satu kelurahan yang memiliki penduduk yang cukup banyak, sebagian besar merupakan pendatang yang tinggal dan menetap di Kelurahan Nalu. Namun ada beberapa wilayah di Kelurahan Nalu masih belum mendapatkan akses informasi yang cukup dalam mendukung proses pelayanan administrasi publik yang baik, yaitu wilayah pesisir yang ada di Lingkungan Salu (Lestari, 2023). Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan, yang hidupnya bergantung pada laut. Ditinjau dari aspek sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dari masyarakat lainnya (Nursam, 2023).

RW 12 (Salu) merupakan bagian dari Kelurahan Nalu yang berada di kawasan pesisir. Letaknya yang berdekatan dengan laut menjadikan wilayah ini identik dengan kehidupan masyarakat nelayan, dimana sebagian besar rumah penduduk berdiri di sekitat tepi pantai. sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, sedangkan sisanya menjadi buruh lepas atau menggarap kebun. Pendapatan masyarakat tergolong rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat sebagian orang tua kesulitan membiayai sekolah anak, sehingga banyak anak memilih membantu orang tua bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Lingkungan Salu terdapat banyak anak putus sekolah dan dapat dikatakan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa tempat yang ada di Kecamatan Baolan

sampai dengan Kelurahan Nalu. Kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan serius terkait keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat setempat.

Selain faktor ekonomi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah. Banyak warga lebih mengutamakan bekerja karena dianggap lebih cepat membantu kebutuhan keluarga. Kurangnya motivasi dari orang tua dan lingkungan membuat masalah ini semakin besar. Hal ini menunjukkan peran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tolitoli belum maksimal dalam memberikan penyuluhan dan program untuk mendorong anak-anak tetap bersekolah. Hal ini terlihat dari tidak adanya sentuhan langsung maupun keterlibatan nyata dinas pendidikan dan kebudayaan Tolitoli dalam menangani permasalahan pendidikan di wilayah tersebut.

Table 1
Anak Putus Sekolah di Lingkungan Salu (RW 12 Kelurahan Nalu)

No	Bulan /Tahun	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		SD	SMP	SMA	
1	Februari /2023	0	4	2	6
2	Juni /2024	0	5	1	6
3	Maret /2025	0	6	2	8

(Sumber: Pemerintah Kelurahan Nalu, 2025)

METODE PENELITIAN

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan data informan yang terkumpul dengan relevan sesuai dengan variable yang akan di teliti dan di deskripsikan dalam bentuk tulisan dengan menggambarkan problematika yang terjadi (Arfan, 2023). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Salu RW 12 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli yang dilaksanakan selama tiga bulan sejak bulan mei sampai dengan bulan juli tahun 2025.

Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian, adapun yang menjadi informan dalam penelitian berjumlah 8 orang, yaitu sebagai berikut : 1) Sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan Tolitoli, alasan menjadikan informan karena berperan penting dalam mengkoordinasikan program pendidikan serta mengetahui kebijakan yang berkaitan dengan penurunan angka putus sekolah. 2) Staf dinas pendidikan dan kebudayaan Tolitoli, alasan memilih sebagai informan karena terlibat langsung dalam pelaksanaan program di lapangan dan dapat memberikan informasi praktis mengenai upaya menurunkan angka putus sekolah. 3) Lurah Kelurahan Nalu, alasan memilih sebagai informan karena mengetahui kondisi masyarakatnya secara langsung, termasuk permasalahan anak putus sekolah di wilayahnya, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan. 4) RW 12 (Salu), alasan memilih informan karena berhubungan langsung dengan warga dan memahami kondisi sosial di Lingkungan Salu, termasuk masalah anak putus sekolah. 5) 3 Masyarakat salu (Orang tua /wali anak putus sekolah), alasan memilih sebagai informan karena mengalami langsung permasalahan putus sekolah melalui anak atau wali yang meraka tanggung, sehingga dapat memberikan informasi nyata mengenai faktor penyebab dan dampaknya. 6) Anak putus sekolah, alasan memilih sebagi informan karena menjadi pihak yang mengalami langsung masalah pendidikan, sehingga dapat memberikan keterangan nyata tentang alasan dan pengalaman berhenti sekolah.

Data yang digunakan berupa data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder (Nur'Aini, 2021). Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan (Observasi), wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan bentuk dinamis dari suatu kedudukan (Status) dimana ketika seseorang menjalankan hak serta kewajibannya, berarti ia tengah melaksanakan peran yang melekat pada kedudukannya (Soekanto, 2002). Tingginya angka putus sekolah di Lingkungan Salu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan, serta minimnya dukungan nyata dari pemerintah daerah. Lebih jauh, dinas pendidikan dan kebudayaan Tolitoli dinilai kurang melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, sehingga permasalahan di lapangan tidak terpantau dengan baik. Untuk menekan angka putus sekolah, dinas seharusnya tidak hanya membuat kebijakan di tingkat administrasi, tetapi juga terjun langsung ke masyarakat, memberikan pendampingan, sosialisasi, serta program bantuan nyata bagi keluarga kurang mampu. Dengan langkah yang lebih konkret tersebut, diharapkan peran dinas dapat benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu mengurangi angka putus sekolah di Lingkungan Salu.

Indikator Peraturan

Peraturan di maksud menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli menjalankan pendidikan, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 yang mewajibkan belajar 12 tahun. Aturan ini menegaskan agar dinas berupaya maksimal memberikan layanan pendidikan terbaik.

Berdasarkan hasil analisa dapat dikatakan indikator peraturan ini belum terpenuhi, program wajib belajar 12 tahun yang seharusnya menjadi landasan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tolitoli masih menghadapi sejumlah kendala. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum berjalan secara maksimal, sehingga kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah masih rendah. Selain itu, temuan di lapangan menunjukkan bahwa informasi terkait program bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) belum tersebar secara merata. Banyak keluarga yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkan informasi memadai mengenai prosedur dan manfaat program tersebut. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam akses bantuan pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada masih tingginya angka putus sekolah di Salu.

Meskipun regulasi wajib belajar 12 tahun telah ditetapkan, implementasinya di Kabupaten Tolitoli masih jauh dari kata optimal. Kelemahan dalam sosialisasi kebijakan dan keterbatasan distribusi informasi mengenai program bantuan pendidikan menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan program tersebut dalam rangka menekan angka putus sekolah.

Indikator Pelaksanaan

Pelaksanaan menjadi tahap awal bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya bersekolah. Salah satu permasalahan yang harus diatasi adalah tingginya angka putus sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan, namun kenyataannya sebagian masyarakat termasuk masyarakat yang berada di Lingkungan Salu belum memperoleh informasi secara merata. Kondisi ini menandakan adanya kelemahan dalam strategi pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal penyampaian informasi dan keterjangkauan program ke seluruh lapisan masyarakat. Analisis lebih lanjut menemukan beberapa penyebab utama yang memengaruhi tidak tercapainya indikator pelaksanaan. Pertama faktor ekonomi, dimana banyak keluarga lebih

memprioritaskan pekerjaan anak untuk membantu penghasilan rumah tangga dibanding melanjutkan sekolah. Kedua faktor budaya dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap pendidikan tidak sepenuhnya penting, sehingga motivasi anak untuk menuntaskan pendidikan hingga tingkat menengah relatif rendah. Ketiga faktor kelembagaan, terutama keterbatasan strategi dinas dalam melakukan sosialisasi serta kurangnya transparansi dan pemerataan informasi mengenai program bantuan, seperti PIP yang sebenarnya dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan khususnya keluarga yang kurang mampu.

Indikator Perilaku

Perilaku dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari struktur sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli diharapkan menunjukkan perilaku positif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sikap tersebut diyakini mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Kabupaten Tolitoli.

Hasil analisa menunjukkan indikator perilaku belum terpenuhi, kondisi ini menandakan unsur kinerja seperti cepat tanggap, dapat dipercaya dan hasil kerja belum berjalan dengan baik. Kondisi tersebut tercermin kurang optimalnya pelaksanaan langkah atau program penanggulangan anak putus sekolah, baik di tingkat Kabupaten Tolitoli maupun di wilayah Lingkungan Salu. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan, koordinasi dan evaluasi agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang nyata. Untuk memperbaiki keadaan ini, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan perencanaan program yang lebih matang, koordinasi yang lebih terarah dengan berbagai pihak terkait, serta evaluasi berkala agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran. Selain itu, perilaku organisasi perlu diarahkan pada sikap yang lebih responsif, transparan dan konsisten dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan upaya menurunkan angka putus sekolah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang rentan terhadap permasalahan pendidikan.

KESIMPULAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tolitoli mempunyai peran penting dalam mengatur, mengelola dan mengembangkan sektor pendidikan. Tugas ini mencakup penyusunan kebijakan, program kerja, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan mutu dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk di Lingkungan Salu. Akan tetapi, kenyataannya Lingkungan Salu masih menjadi wilayah dengan jumlah anak putus sekolah yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan dinas belum sepenuhnya efektif dan belum menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat di Lingkungan Salu masih banyak yang belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dinas pendidikan belum berjalan maksimal. Dampaknya masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak mendapat bantuan pendidikan sebagaimana mestinya. Situasi ini memperlihatkan penyebaran informasi dan koordinasi antara dinas dengan pihak sekolah masih sangat lemah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi melalui berbagai jalur, seperti melalui sekolah, media lokal, maupun kegiatan masyarakat, serta memperkuat kerja sama dengan pihak sekolah dalam mendata anak putus sekolah agar mereka bisa kembali mendapatkan akses pendidikan.

Indikator pelaksanaan program pendidikan, khususnya dalam bentuk sosialisasi juga belum merata di Kabupaten Tolitoli. Lingkungan Salu menjadi contoh salah satu wilayah yang tidak pernah tersentuh penyuluhan maupun informasi tentang pentingnya melanjutkan sekolah. Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah, sehingga angka putus sekolah tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa agenda sosialisasi belum

dilakukan secara adil dan masih terfokus pada daerah tertentu saja. Untuk itu, dinas pendidikan sebaiknya menyusun strategi pemerataan kegiatan sosialisasi hingga ke wilayah terpencil, melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat, sehingga pesan tentang pentingnya pendidikan dapat sampai langsung ke masyarakat.

Indikator perilaku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli belum menunjukkan keterlibatan yang nyata dengan masyarakat Lingkungan Salu. Tidak adanya kunjungan ke sekolah maupun interaksi tatap muka membuat dinas kurang memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini menggambarkan lemahnya inisiatif pelayanan publik dan minimnya koordinasi dengan aparat setempat. Kondisi tersebut tentu membuat kebijakan yang ada tidak sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dinas perlu membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat melalui kunjungan langsung, forum musyawarah ataupun program jemput bola. Dengan sikap yang lebih responsif dan terbuka ini, dinas dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan.

DFTAR RUJUKAN

- Arfan, A., Safar B, A. W., & Bantilan, M. (2023). Manajemen Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Malambigu Di Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. *Paraduta : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 45–50.
- Fauziah, S., Yulianti, R., & Andriani, M. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah Tingkat Smp Di Kota Banjar. *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 194–206.
- Iis Margiyanti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208.
- Lestari, A., Arsyad, D. H., Nur'aini, A., Nursifa, N., Iqbal, M., & Safar, A. W. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pesisir Tentang Pelayanan Administrasi Publik di Dusun Salu Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya*, 1(2), 34. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v1i2.254>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Permen Nomor 80*. 1–7.
- Nur'Aini, A. (2021). Jurnal Penelitian Tolis Ilmiah. *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 2(1), 43–48.
- Nursam, N., Bantilan, M. M., Kahar, A., Liow, E., Arfan, A., & Safar, A. W. (2023). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Pada Pemilu 2024. *Tolis Mengabdikan : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 29.
- Peraturan, P. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2008. Indonesia.
- Rizki Ananda. (2025) Permasalahan Putus Sekolah Pendidikan Dasar Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar *Vol.10 nomoe 02*.
- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Hanafi, M., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Ap, S. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Raja Grafindo Persada Edisi Ke 2.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiranto, M., & Liow, E. D. P. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyediaan Listrik Di Dusun Salu Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(2), 119-125.